



# PERPOLISIAN BERBASIS HAM DI INDONESIA MEKANISME AKUNTABILITAS EKSTERNAL

Polisi memiliki kewajiban melindungi hak asasi manusia (HAM) serta menjunjung hukum. Untuk melakukan hal ini, mereka diberikan kekuasaan signifikan termasuk kekuasaan untuk mencabut kebebasan dari seseorang serta menggunakan kekuatan, dan dalam keadaan tertentu menggunakan kekuatan yang dapat mematikan. Ketika polisi menyalahgunakan kekuasaan mereka dan tidak diminta untuk berakuntabilitas atas tindakan mereka, masyarakat mulai tidak memercayai mereka dan lingkaran setan rasa ketidakpercayaan serta kekerasan pun dimulai juga. Oleh karenanya penting bahwa polisi berakuntabilitas terhadap komunitas tempat mereka beroperasi. Bilamana ada rasa percaya di antara polisi dan masyarakat, maka kemitraan untuk menemukan jalan keluar bagi masalah bisa dibangun dan hubungan bisa dikembangkan untuk membantu mencegah dan mendeteksi kejahatan.

Ada berbagai jenis mekanisme akuntabilitas independen. Biasanya mekanisme-mekanisme itu adalah badan independen dan tak memihak yang didanai oleh pemerintah dan dibentuk oleh undang-undang. Mereka memiliki kekuasaan untuk menyidik pengaduan serta menjamin bahwa tindakan pemulihan hukum (remedial) yang tepat dilakukan.

Penting untuk diperhatikan bahwa adanya pihak otoritas pengaduan independen tidak artinya meniadakan kebutuhan akan mekanisme pengawasan internal yang efektif. Polisi juga memiliki kepentingan untuk secara efektif menangani pelanggaran peraturan yang mana pun dan mempertahankan disiplin. Peranan mekanisme eksternal adalah untuk mengurus pengaduan serius yang menjadi kepentingan umum untuk dilakukan secara efektif melalui penyidikan eksternal.

## PENGAWASAN INDEPENDEN

Badan-badan pengawasan dibagi dalam dua kategori besar. Yang pertama, badan yang secara eksklusif menyidik, meninjau dan memonitor pengaduan terhadap polisi. Yang kedua, badan seperti ombudsman dan lembaga HAM nasional yang mendapat mandat lebih luas yang melingkupi pengawasan atas kepolisian serta semua kebijakan dan strategi polisi.

## PERAN BADAN PENGAWASAN

Keterlibatan dalam proses pengaduan sangat bervariasi di antara badan pengawasan yang berbeda. Walau sejumlah badan memang memegang tanggung jawab utama untuk menerima dan menginvestigasi pengaduan, yang lebih umum ditemukan adalah badan yang meninjau, memonitor dan mengaudit pengaduan serta penyidikan bukannya melakukan penyidikan sendiri.

## MODEL-MODEL BERBEDA MEKANISME PENGAWASAN SIPIL

### INVESTIGASI INDEPENDEN

- Sepenuhnya terlepas dari kepolisian atau mandiri.
- Menerima pengaduan dari publik.
- Investigasi dilakukan oleh non-petugas.
- Melaporkan penemuan kepada polisi.

**Contoh:** Ombudsman Kepolisian, Irlandia Utara

### INVESTIGASI OLEH POLISI, DENGAN PENINJAUAN OLEH WARGA NEGARA ATAU PENGAJUAN BANDING KE OTORITAS SIPIL

- Pihak berwenang sipil atau polisi menerima pengaduan.
- Polisi melakukan penyidikan.
- Pihak berwenang sipil meninjau laporan investigasi.
- Pihak berwenang sipil bisa meminta adanya penyidikan lebih lanjut jika mereka tidak setuju dengan laporan polisi.

**Contoh:** Deputy Ombudsman, Victoria, Australia  
Otoritas Pengaduan Kepolisian, Inggris/Wales  
Direktorat Pengaduan Independen, Afrika Selatan

### INSPEKTUR JENDRAL, AUDITOR DAN KOMISI HAM

- Mandat luas untuk menginvestigasi dan membuat rekomendasi tentang proses pengaduan dan mengenai persyaratan yang melandasinya yang menuntun pada penyalahgunaan kepolisian.
- Bisa menginvestigasi kasus-kasus individual tentang tuduhan pelanggaran.

**Contoh:** Komisi HAM, India  
Auditor, São Paulo, Brasil

### PENGAWASAN SIPIL JENIS LAIN

- Konsultasi dan pengontrolan atas kebijakan pemolisian yang lebih luas.

**Contoh:** Otoritas Kepolisian, Inggris/wales  
Dewan Komisaris Polisi, Los Angeles, AS

## PERSYARATAN MINIMUM UNTUK ADANYA BADAN PENGAWASAN YANG BERHASIL

### INDEPENDEN:

Harus terlepas atau independen dari pihak eksekutif dan kepolisian serta diberdayakan untuk melapor langsung ke Parlemen.

### KEKUASAAN YANG MEMADAI:

Harus memiliki wewenang untuk menginvestigasi pengaduan secara independen dan mengeluarkan hasil penemuannya. Hal ini membutuhkan adanya kekuasaan untuk melangsungkan sidang pemeriksaan, mengeluarkan dokumen untuk memanggil orang ke pengadilan dan para saksi, termasuk polisi. Badan ini juga harus dapat mengenali masalah keorganisasian dalam kepolisian dan menyarankan reformasi sistemis.

### SUMBER DAYA YANG MEMADAI:

Harus, sebagai persyaratan minimum, memiliki dana yang memadai untuk menyidik pengaduan yang lebih serius yang dirujuk kepadanya. Sumber daya manusia yang terampil untuk melakukan investigasi dan untuk menangani pengaduan harus pula ada.

### KEKUASAAN UNTUK MENGIKUTI REKOMENDASI:

Harus diberdayakan untuk melaporkan hasil temuannya dan rekomendasinya kepada publik, dan mengikuti tindakan yang diambil oleh Kepala Kepolisian sebagai tanggapan atas rekomendasinya. Badan ini juga harus dapat meminta perhatian Parlemen jika ada kejadian polisi tidak mengambil tindakan apa pun.

Mekanisme independen pengaduan kepolisian sudah terbukti efektif dalam meningkatkan keyakinan masyarakat akan kepolisian dan dalam mencegah polisi melakukan perilaku yang salah. Mekanisme ini juga dapat memperbaiki perpolisian dengan mengusulkan amendemen terhadap undang-undang, regulasi serta praktik administratif. Namun, agar efektif dan mencegah dipindahkannya kekuasaan ke lembaga lainnya, diperlukan adanya struktur yang melingkupi rentang mekanisme akuntabilitas yang mencerminkan sejumlah nilai: responsivitas masyarakat; transparansi; penghormatan kepada badan yudikatif atau kehakiman dan kepatuhan kepada kebijakan, regulasi dan undang-undang; dan sikap terbuka serta mau bekerja sama dengan badan pengawasan independen.

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**



**Amnesty International** adalah gerakan global 2,2 juta orang di lebih dari 150 negara dan wilayah yang mengkampanyekan diakhirinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Visi kami adalah agar semua orang dapat menikmati semua hak yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standar HAM internasional lainnya.

Kami bersifat mandiri atau independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi dan agama mana pun – dan didanai sebagian besar oleh dana keanggotaan dan sumbangan masyarakat.

May 2009  
Index: ASA 21/011/2009

Amnesty International  
International Secretariat  
Peter Benenson House  
1 Easton Street  
London WC1X 0DW  
United Kingdom  
[www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)